



**KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI DALAM PERANG RUSIA-  
UKRAINA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mohammad Ghufron Al Chotib**

**NIM 190910101075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**JEMBER**

**2023**



**KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI DALAM PERANG RUSIA-  
UKRAINA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Mohammad Ghufron Al Chotib

NIM 190910101075

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JEMBER**

**2023**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Orang tua yang saya cintai, Bapak Moch. Chotibur Rohman dan Ibu Rufiah yang telah memberikan doa kepada saya dan dukungan dalam mendampingi penulis untuk meraih cita-cita
2. Para guru dan dosen saya yang telah membimbing penulis sejak SD hingga saya dapat memperoleh gelar Sarjana, semoga kalian diberikan pahala atas ilmu yang diberikan kepada saya.
3. Teman-teman sekolah dan almamater saya dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Jember.



**MOTTO**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Terjemahan QS. Al Baqarah: 286)<sup>1</sup>.



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Ghufron Al Chotib

NIM : 190910101075

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan ilmiah yang berjudul: *“Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Perang Rusia-Ukraina”* Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum diajukan pada lembaga manapun, dan bukan karya dari orang lain. Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dari tulisan ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang saya junjung.

Demikian pernyataan tersebut saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan saya bersedia untuk mendapat sanksi jika ternyata dikemudian hari pernyataan saya tidak benar.

Jember, 16 Juni 2023

Yang Menyatakan,

Mohammad Ghufron Al Chotib

NIM 190910101075

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul *Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Perang Rusia-Ukraina* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Juli 2023

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Drs. Djoko Susilo, M.Si.

NIP : 195908311989021001 (.....)

2. Pembimbing Anggota

Nama : Drs. Pra Adi Soelistijono M.Si.

NIP : 196105151988021001 (.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dra. Sri Yuniati, M.Si.

NIP : 196305261989022001 (.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.

NIP : 197701052008012013 (.....)

**RINGKASAN**

**Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Perang Rusia-Ukraina;** Mohammad Ghufron Al Chotib, 190910101075; 2023; 40 halaman; Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Invasi yang dilakukan oleh Rusia tersebut membuat banyak negara termasuk NATO menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Turki mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia dengan mengirimkan beberapa persenjataan. Namun di sisi lain, Turki memiliki hubungan dengan Rusia dalam bidang perekonomian. Hubungan dengan Rusia tersebut kemudian dapat merusak citra Turki sebagai anggota NATO karena negara anggota NATO lainnya mendukung Ukraina dengan menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Disisi lain, Turki hingga saat ini belum menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari buku, media, jurnal, & literatur-literatur lainnya yang mempunyai hubungan dengan strategi kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina. Sedangkan, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dari Milles & Huberman.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa strategi Turki terhadap Rusia dalam Perang Rusia Ukraina yaitu untuk memperbaiki perekonomian negaranya dengan melakukan berbagai kerjasama dengan Rusia seperti: mengintensifkan perdagangan melalui Dewan Kerjasama Tingkat Tinggi (HLCC), membuka pintu bagi wisatawan Rusia, memikat investor dengan pemberian kewarganegaraan, dan kerjasama pembangunan PLTN. Sedangkan, strategi Turki terhadap Ukraina yaitu Turki menjalin kerjasama dengan Ukraina dalam bidang pertahanan melalui HLCC dan memberikan dukungan secara diplomatik terhadap Ukraina. Kerjasama dalam pengiriman persenjataan dan dukungan secara diplomatik tersebut dilakukan untuk memperbaiki citra Turki di mata para anggota NATO lainnya. Sehingga, Turki dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak terutama dari negara-negara Barat ketika menjalin suatu kerjasama.

## PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi saya rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Perang Rusia-Ukraina”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Djoko Susilo, M.Si. dan Drs. Pra Adi Soelistijono M.Si. selaku dosen pembimbing bagi penulis yang telah memberikan kontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Drs. Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis dalam melakukan Kartu Rencana Studi (KRS) hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Tim penguji yang telah memberikan banyak kritik serta saran demi penyempurnaan skripsi baik saat sidang maupun saat revisi skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna namun penulis berharap, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 16 Juni 2023

Penulis,

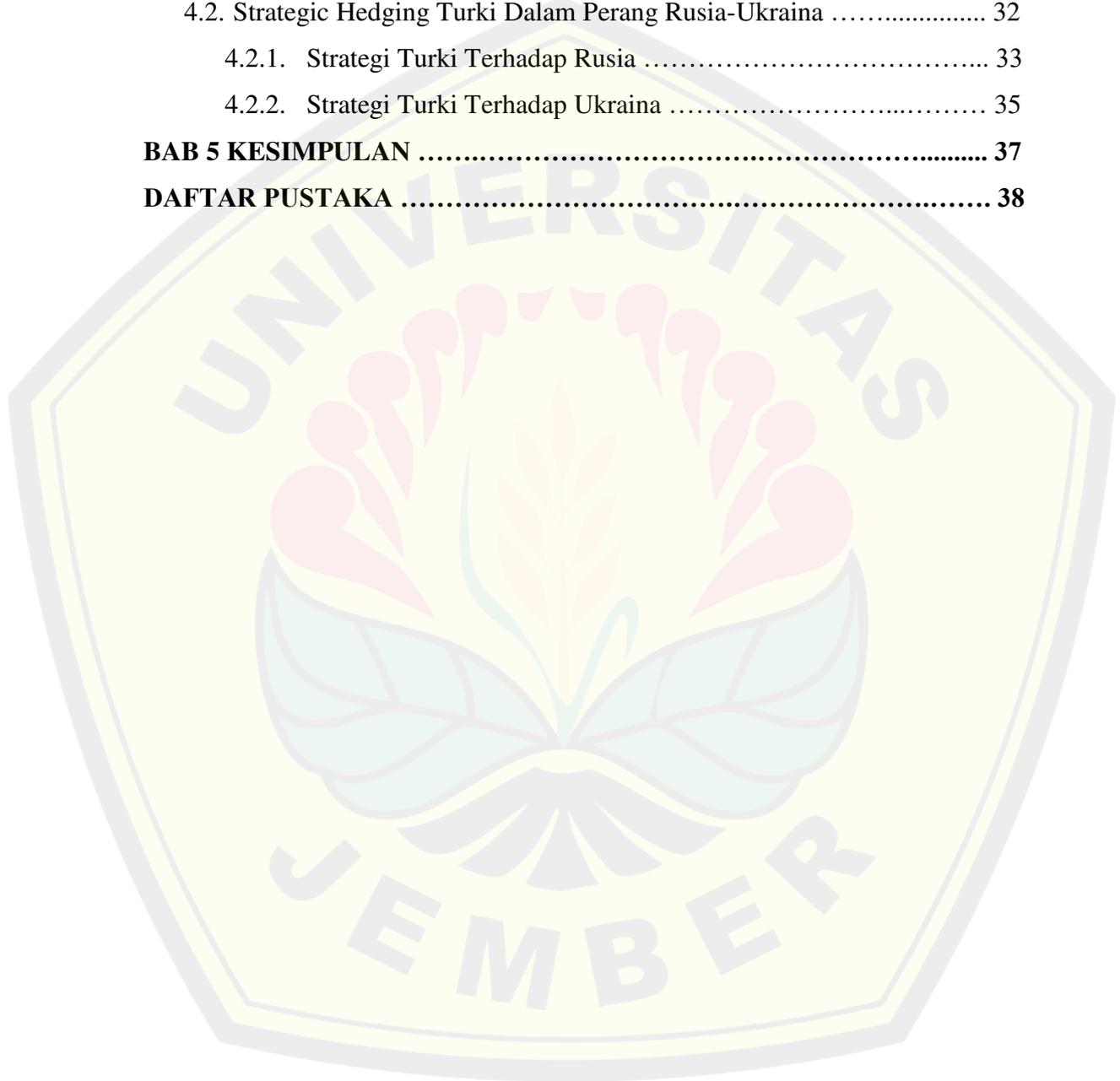
Mohammad Ghufron Al Chotib

NIM 190910101075

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>II</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>III</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>IV</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>VI</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>VII</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>4</b>
2.1. Kerangka Teori .....	4
2.2. Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian .....	6
2.3. Tinjauan Studi Terdahulu .....	9
2.4. Ringkasan Penerapan Teori .....	11
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>13</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	13
3.2. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
3.4. Teknik Analisis Data .....	14
3.5. Keabsahan Data .....	15
3.6. Struktur Penelitian .....	15
<b>BAB 4 PEMBAHASAN</b> .....	<b>17</b>

4.1. Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Menghadapi Perang Rusia-Ukraina .....	17
4.1.1. Dalam Bidang Pembuatan Keputusan .....	18
4.1.2. Dalam Bidang Ekonomi .....	22
4.1.3. Dalam Bidang Militer .....	26
4.2. Strategic Hedging Turki Dalam Perang Rusia-Ukraina .....	32
4.2.1. Strategi Turki Terhadap Rusia .....	33
4.2.2. Strategi Turki Terhadap Ukraina .....	35
<b>BAB 5 KESIMPULAN .....</b>	<b>37</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.2. Indikator-Indikator dari Strategic Hedging ..... halaman 8



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perang Rusia di Ukraina telah mengubah peta geopolitik Eropa dan memicu terjadinya kekacauan besar dalam geopolitik internasional. Dengan sebagian besar dari negara Barat bersatu untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia, tidak dapat dihindari bahwa dampak dari konflik tersebut telah meluas dari regional ke dimensi internasional. Ketika umumnya gelombang perang bergema dari Timur Tengah hingga Asia, namun sekarang hanya sedikit yang dapat dilakukan negara-negara Barat untuk dapat mengisolasi diri dari eskalasi militer di Eropa Timur yang secara dramatis mendatangkan malapetaka bagi mereka.

Pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia menyerang Ukraina dalam eskalasi besar-besaran sejak konflik separatistis di Donetsk dan Luhansk yang telah dimulai sejak tahun 2014. Sebelum terjadinya invasi, pada tanggal 21 Februari tahun 2022 Rusia menyetujui kedaulatan wilayah Donetsk dan Luhansk (dua negara bagian yang ingin memisahkan diri dari Ukraina) sebagai negara independen (Dries Lesage, Emin Daskin, & Hasan Yar, 2022). Pada tanggal 22 Februari 2022, Dewan Rusia mengizinkan tentang penggunaan persenjataan militer dan Presiden Putin mengerahkan pasukan Rusia agar segera menyerbu ke kedua wilayah tersebut. Invasi tersebut menyebabkan krisis pengungsi terbesar di benua Eropa, dengan sekitar 7,3 juta orang Ukraina melarikan diri dari negara tersebut (Dries Lesage, Emin Daskin, & Hasan Yar, 2022). Hal tersebut juga menyebabkan terjadinya kekurangan suplai energi & pangan secara global. Dalam pidato sesaat sebelum invasi, presiden menentang hak Ukraina untuk menjadi negara anggota NATO<sup>2</sup> dan mengklaim Ukraina diperintah oleh pasukan berpaham ideologi neo-Nazi yang menganiaya etnis Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk.

---

<sup>2</sup>NATO (North Atlantic Treaty Organization) merupakan pakta aliansi militer dan politik yang terdiri dari negara-negara di benua Eropa dan Amerika Utara.

Sebagai anggota NATO yang bersekutu dengan Rusia tetapi memberikan dukungan militer ke Ukraina, Turki mewakili pemain geopolitik yang unik dalam konflik Rusia-Ukraina. Turki telah memposisikan dirinya sebagai perantara antara Rusia dan Ukraina, dalam upaya untuk melakukan hubungan dengan Rusia dan Ukraina. (Eugene Chausovsky, 2022). Turki mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia dengan mengirimkan beberapa persenjataan. Di sisi lain, Turki memiliki hubungan dengan Rusia di dalam bidang perekonomian (Eugene Chausovsky, 2022).

Hubungan dengan Rusia tersebut kemudian dapat merusak citra Turki sebagai anggota NATO karena negara anggota NATO lainnya mendukung Ukraina dengan menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Disisi lain, Turki hingga saat ini belum menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Turki justru tidak jarang melakukan kerja sama dengan Rusia di bidang perekonomian. Hubungan yang harmonis antara Turki dengan Rusia ini kemudian secara serius dapat merusak hubungan Turki dengan NATO. Turki menghadapi tuduhan sebagai negara war profiteering<sup>3</sup> dari negara anggota NATO lainnya dengan membantu Rusia dalam menghindari dampak dari sanksi internasional untuk keuntungan Turki sendiri (Eugene Chausovsky, 2022).

Strategi kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina ini menimbulkan pertanyaan. Turki merupakan anggota penting dari aliansi NATO. Turki pun menjalin hubungan baik dengan Ukraina yang mendapat dukungan NATO dalam perang melawan Rusia. Dalam Perang Rusia-Ukraina, Turki dengan Rusia tidak jarang menjalin kerjasama yang membuat pemberlakuan sanksi kepada Rusia tidak dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, maka disini penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut ke dalam judul penelitian.

## **1.2. Rumusan Masalah:**

Permasalahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: bagaimana strategi kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina?

---

<sup>3</sup>War Profiteering yaitu praktek yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari suatu peperangan.

### **1.3. Tujuan Penelitian:**

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

### **1.4. Manfaat Penelitian:**

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian berikutnya
- Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan Ilmu Hubungan Internasional kedepannya.

#### 2. Manfaat praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang strategic hedging guna untuk meneliti suatu strategi dari suatu negara
- Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dan juga mahasiswa dari bidang keilmuan lainnya yang memiliki perhatian yang sama terhadap Perang Rusia-Ukraina.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Kajian teoritis merupakan salah satu bagian dalam penulisan penelitian. Kajian teoritis dapat berguna untuk meletakkan posisi penulis dari segi perspektif dalam melihat dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Penggunaan kajian teoritis dalam penelitian dapat berupa teori-teori ataupun konsep yang dirangkai secara sistematis supaya dapat membantu dalam memahami analisis dalam proses penelitian. Dalam kajian teoritis meliputi konsep dan teori yang berguna sebagai alat untuk menganalisis, menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menganalisis permasalahan ini, menggunakan teori Foreign Policy dari Rosenau dan Breuning serta konsep strategic hedging dari Cheng-Chwee Kuik dan Tessman & Wolfe.

#### 2.1. Foreign Policy

Rosenau mengatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya atau memenuhi kepentingan nasionalnya di dalam panggung internasional (Vinsensio Dugis, 2008). Sedangkan Breuning, mengartikan kebijakan luar negeri sebagai kebijakan dari suatu negara pada hubungan dengan daerah di perbatasan dari negara tersebut (Marijke Breuning, 2007). Dari kedua pengertian sebelumnya bisa disimpulkan bahwasanya kebijakan luar negeri berdasarkan pada tujuan nasional dari suatu negara yang berdampak pada masyarakat yang menjadi objek dari kebijakan tersebut. Sehingga, kebijakan luar negeri menjadi hal terpenting yang dapat mengantarkan negara meraih kepentingan nasionalnya. Selain itu, kebijakan luar negeri pun dapat dikatakan sebagai cara dari suatu negara dalam interaksi dengan negara lainnya di berbagai hal seperti sosial-budaya, keamanan, ekonomi.

Bagi Holsti, definisi dari kebijakan luar negeri yakni rangkaian ide yang direncanakan atau dibuat oleh pembuat kebijakan dalam melakukan pemecahan permasalahan yang berpengaruh pada perubahan yang berupa sikap, kebijakan,

atau tindakan dari negara (Marijke Breuning, 2007). Meskipun begitu, tidak semua sumber daya (baik itu militer maupun ekonomi) di suatu negara mencukupi untuk dapat mandiri sehingga kekurangan tersebut harus dimasukkan ke dalam masalah keamanan nasionalnya. Great powers dapat memberikan bantuan kepada negara-negara kecil dengan sumber daya yang dibutuhkan, tetapi great powers juga dapat mengancam keamanan dari negara-negara kecil dan lemah untuk hal mendominasi sumber daya ataupun mendominasi perpolitikan mereka (Vinsensio Dugis, 2008). Strategi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut kemudian ditentukan ketika mereka dihadapkan oleh kekuatan yang kuat dan berpotensi mengancam.

Setiap upaya untuk melakukan analisis kebijakan luar negeri dari suatu negara dibagi ke dalam kategori yang mendefinisikan atribut negara, seperti ukuran kekuatan dan kapabilitasnya. Dalam ruang lingkup kekuasaan, negara umumnya diklasifikasikan sebagai negara great powers dan negara kecil. Turki dapat dianggap sebagai negara kecil dikarenakan potensinya yang terbatas untuk mengubah tatanan internasional dan ketidakmampuannya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri dari negara kecil umumnya terdiri dari balancing atau bandwagoning (Vinsensio Dugis, 2008).

Balancing merupakan sebuah strategi dimana suatu negara memilih untuk berkoalisi dengan great powers dalam hal mengenai kerjasama pembangunan militer (internal) dan/atau membentuk aliansi (eksternal) (Marijke Breuning, 2007). Sedangkan bandwagoning merupakan sebuah strategi dimana negara kecil memilih untuk beraliansi dengan musuhnya yang lebih kuat. Hal ini lantaran biaya untuk melawan musuhnya yang kuat justru cukup mahal dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh (Marijke Breuning, 2007). Hubungan antar negara juga dapat memainkan peran penting untuk menentukan bentuk dari kebijakan luar negeri, terutama untuk negara-negara kecil dan lemah, yang sebenarnya dapat mencoba untuk menyeimbangkan kekuatan besar, beraliansi dengan mereka, atau melakukan hedging kepada kedua belah pihak (Marijke Breuning, 2007).

Beberapa ahli teori internasional menyatakan bahwasanya balancing lazim dijalankan oleh suatu negara daripada bandwagoning dalam politik dunia. Dimana Waltz menyatakan bahwa, pada saat terjadinya pergeseran kekuatan global, negara-negara kecil lebih berbondong-bondong untuk bergabung ke sisi yang lebih lemah, karena sisi yang lebih kuatlah yang justru mengancam mereka” (Vinsensio Dugis, 2008). Meskipun begitu, balancing memiliki biaya dan dampak yang tidak dapat dipastikan. Balancing secara internal misalnya, memerlukan redistribusi sumber daya internal yang mungkin diperlukan di tempat lain, sementara balancing secara eksternal mencakup bahaya akan dijebak dan ditinggalkan oleh negara sekutu. (Cheng-Chwee Kuik, 2008). Namun, selain dua hal tersebut terdapat strategi yang lebih baik untuk negara kecil yaitu strategic hedging.

## **2.2. Strategic Hedging**

Istilah hedging diperkenalkan dalam kamus Hubungan Internasional (IR) pada 1990-an, ketika para sarjana mulai memakai istilah tersebut untuk menggambarkan perilaku negara di mana suatu negara mengambil posisi tengah di antara balancing dan bandwagoning (Cheng-Chwee Kuik, 2008). Cheng-Chwee Kuik mengartikan strategic hedging sebagai "perilaku di mana suatu negara berupaya untuk mengimbangi risiko dengan mengejar berbagai pilihan kebijakan yang dimaksudkan untuk menghasilkan efek yang saling menguntungkan di bawah situasi ketidakpastian" (Cheng-Chwee Kuik, 2008). Dengan demikian strategic hedging dapat dikatakan sebagai strategi yang menggabungkan balancing dan bandwagoning dimana suatu negara melawan kekuatan yang mengancam melalui penguatan terhadap pertahanannya sendiri dan/atau membentuk aliansi dengan negara lain sambil pada saat yang sama melakukan pendekatan dengan kekuatan yang mengancam tersebut. Strategi ini dapat membantu suatu negara untuk mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi, ketidakpastian, dan risiko dengan melindungi serta meningkatkan posisi keamanannya jika hubungannya dengan negara besar dapat memburuk.

Menggabungkan balancing dan bandwagoning dapat bermanfaat bagi negara kecil. Dimana, bandwagoning bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik yang bersahabat dengan kekuatan yang mengancam dan menghasilkan manfaat ekonomi melalui kerjasama. Tindakan balancing dapat memberikan jaminan keamanan jika pendekatan bandwagoning gagal atau kekuatan yang mengancam menjadi agresif. Umumnya yang pertama terjadi di bidang ekonomi sedangkan yang terakhir terjadi di bidang keamanan militer (Marijke Breuning, 2007).

Dalam ranah pengambilan kebijakan, hedging dipandang oleh banyak orang sebagai perilaku yang kontroversial dan bahkan tidak diinginkan. Dimana, great powers tidak menyetujui perilaku seperti itu sehingga negara-negara kecil dan lemah menyangkal bahwa mereka melakukan hedging. Banyak pejabat pemerintah dan pengamat pun menganggap bahwa hedging sebagai kebijakan yang spekulatif, pasif, dan tidak realistis. Beberapa bahkan mencela strategic hedging sebagai kebijakan berbahaya, menganggapnya sebagai sumber ketidakpastian & ketidakstabilan politik (Marijke Breuning, 2007). Amerika Serikat dan China yang melihat diri mereka sebagai target utama dari strategi hedging, seringkali menyatakan ketidaksukaan atas perilaku tersebut. Mereka mengabaikan hedging sebagai suatu kebijakan yang oportunistik dan mendesak negara-negara yang telah mempraktikkan hedging untuk berhenti melakukannya (Marijke Breuning, 2007).

Oleh karena kesalahpahaman yang menyamakan hedging dengan prinsip keragu-raguan, hampir semua negara menghindari mengasosiasikan diri mereka dengan istilah tersebut. Biasanya, negara-negara kecil dan lemah (seperti negara-negara anggota ASEAN) memilih untuk menggambarkan kebijakan mereka sebagai “non-blok” atau “netral” (Vinsensio Dugis, 2008). Terlepas dari label mereka, pada kenyataannya negara-negara kecil seringkali melakukan praktik hedging dalam berbagai bentuk. Hedging merupakan kebijakan yang dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan (Vinsensio Dugis, 2008). Melakukan sebaliknya akan mengundang dorongan balik yang tidak diinginkan dari great powers yang bersaing, mengalahkan tujuan dari tindakan ambigu yang sengaja dibuat tersebut.

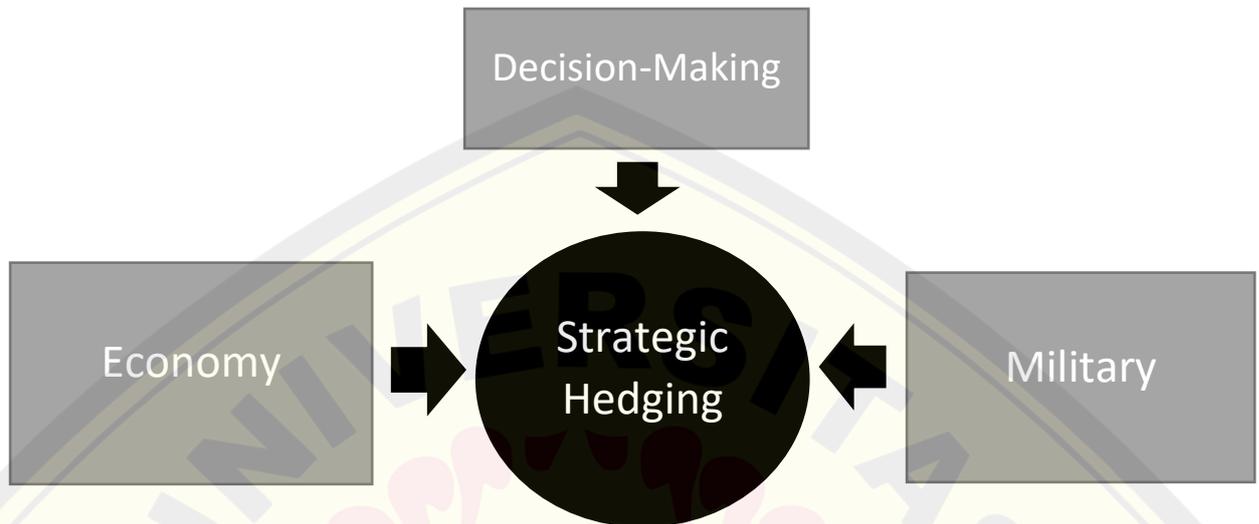
Berbagai jenis negara pada ukuran hirarki kekuasaan telah menggunakan strategic hedging sebagai alternatif untuk strategi balancing dan bandwagoning.

Menurut Sherwood, praktik dari negara-negara kecil dalam sistem internasional biasanya menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki elemen keamanan dan pengaruh dan berusaha untuk mengkompensasi kekurangan elemen tersebut dalam hubungannya dengan kekuatan besar. Kunci utama dalam memahami strategic hedging ini adalah bahwa negara yang menerapkan strategic hedging pada dasarnya mencoba untuk mengurangi ancaman terhadap stabilitasnya. Dengan kata lain, motifnya di sini bukan hanya untuk memperoleh keuntungan materi atau mengubah statusnya dalam panggung internasional, melainkan untuk mengamatkannya (Cheng-Chwee Kuik, 2008). Negara juga menggunakan strategic hedging ketika kekuatan sekutu dikurangi untuk memastikan keamanan nasional negara-negara tersebut, sementara pada saat yang sama meningkatkan kemampuan kekuatan kompetitif secara keseluruhan (Cheng-Chwee Kuik, 2008).

Tujuan dari negara-negara yang melakukan hedging yaitu untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan great powers yang saling bersaing (untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dari perjanjian yang terjalin), memupuk perlindungan secara maksimum untuk mengimbangi berbagai risiko di bawah ketidakpastian dalam melakukan kebijakan terhadap negara great powers (mempersiapkan skenario terburuk), dan, pada akhirnya, menjaga semua opsi yang ada tetap terbuka kepada kedua belah pihak yang bersaing (Vinsensio Dugis, 2008).

Hedging dianggap sebagai strategi yang ‘cerdas’ dimana negara-negara kecil dapat menentukan strateginya terhadap negara yang lebih besar. Dalam menerapkan strategic hedging, diperlukan kapabilitas untuk melakukannya. Tessman dan Wolfe (2011) dalam bukunya yang berjudul "Great Powers and Strategic Hedging", memberikan tiga indikator dari strategic hedging yaitu pembuatan keputusan (decision-making), ekonomi (economy) dan militer (military) yang dapat dilihat dalam gambar 2.2. sebagai berikut:

Gambar 2.2.  
Indikator-Indikator dari Strategic Hedging



### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni upaya peneliti dalam mencari perbandingan lalu selanjutnya menemukan inspirasi yang baru demi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu penelitian untuk bisa memposisikan dan menunjukkan otentisitas dari penelitian tersebut. Pada bagian ini, peneliti menuliskan berbagai hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan suatu penelitian yang ingin dilakukan, lalu membuat ringkasannya berupa penelitian yang telah terpublikasikan ataupun belum terpublikasikan. Dalam menguraikan serta membandingkan penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber literature. Tiga literatur tersebut yaitu milik Andi Iswan Ilyas (2018), Sugi Astarahma (2022), dan Qomarul Laili (2021).

Andi Iswan Ilyas (2018) menuliskan penelitiannya yang berjudul Ambivalensi Kebijakan Politik Luar Negeri Turki dibawah Kepemimpinan Erdogan terhadap Israel, dalam sebuah jurnal yang bernama Universitas Hasanuddin: Fak.Ilmu Sosial dan Politik, 2018. Dalam penelitiannya, Andi Iswan Ilyas mempunyai fokus kajian terkait dengan kerja sama bilateral antara Israel dan Turki mengenai kebijakan politik luar negeri Turki di era Pemerintahan Erdogan.

Dalam penelitian tersebut, Andi Iswan Ilyas (2018) menggunakan konsep political personality. Konsep political personality digunakan untuk menganalisis kepemimpinan Erdogan dalam memainkan politik luar negeri dengan Israel dan Palestina. Turki menjalin hubungan politik dengan Israel, namun di sisi lain Erdogan sebagai Pengambil kebijakan utama Turki juga menjalin hubungan dan memberi dukungan kepada Palestina. Keadaan inilah yang memunculkan sifat ambivalen tentang sikap konsistensi Turki terhadap Israel. Penelitian yang ditulis oleh Andi Iswan Ilyas (2018) membahas terkait dengan sikap Turki terhadap Israel dan Palestina. Sedangkan, penelitian ini memberikan pembahasan terkait dengan strategi kebijakan Turki terhadap Rusia dan Ukraina dalam Perang Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dari Breuning & Rosenau serta konsep strategic hedging dari Cheng-Chwee Kuik. Melalui pendekatan dari Cheng-Chwee Kuik dapat memberikan penjelasan terkait strategi kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

Sugi Astarahma (2022) menuliskan penelitiannya yang berjudul Kepentingan Turki Dalam Konflik Armenia dan Azerbaijan 2020, dalam sebuah jurnal yang bernama Universitas Hasanuddin: Fak.Ilmu Sosial dan Politik, 2020. Dalam penelitiannya, Sugi Astarahma mempunyai fokus kajian terkait dengan strategi kebijakan luar negeri Turki dalam Konflik Armenia dan Azerbaijan. Dalam penelitian tersebut, Sugi Astarahma (2022) menggunakan konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan kepentingan Turki dalam konflik Azerbaijan dan Armenia. Penelitian yang ditulis oleh Sugi Astarahma (2022) membahas terkait dengan Kepentingan Turki dalam konflik Azerbaijan dan Armenia yang telah berlangsung hingga tahun 2020. Kedekatan Turki dan Azerbaijan dapat ditelusuri dari kerja sama militer yang dimulai pada tahun 1992. Sedangkan, penelitian ini memberikan pembahasan terkait dengan strategi kebijakan Turki terhadap Ukraina yang dapat ditelusuri dari perjanjian free trade and drone yang dimulai pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dari Breuning & Rosenau serta konsep strategic hedging dari Cheng-Chwee Kuik.

Melalui pendekatan dari Cheng-Chwee Kuik dapat memberikan penjelasan terkait strategi kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

Qomarul Laili (2021) menuliskan penelitiannya yang berjudul Analisis Intervensi Turki dalam Krisis Libya pada tahun 2019-2020, dalam sebuah jurnal yang bernama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Fak.Ilmu Sosial dan Politik, 2021. Dalam penelitiannya, Qomarul Laili mempunyai fokus kajian terkait dengan kebijakan luar negeri Turki terhadap konflik di Libya. Dalam penelitian tersebut, Qomarul Laili (2021) menggunakan teori analisa kebijakan luar negeri. Teori analisa kebijakan luar negeri digunakan untuk memahami alasan Turki memutuskan untuk intervensi militer kepada Libya. Penelitian yang ditulis oleh Sugi Astarahma (2022) membahas bahwa kebijakan intervensi Turki di Libya pada awal tahun 2020 bukan dilakukan dengan tanpa alasan, terdapat banyak faktor di balik proses pengambilan kebijakan tersebut yakni: Faktor individu yakni Erdogan yang populis, faktor dukungan dari birokrasi yakni Menteri luar negeri serta badan pertahanan Turki, dominasi partai politik yang mengusung Erdogan yakni AKP, dan hubungan Turki dengan Libya yang buruk. Sedangkan, penelitian ini tidak hanya memberikan pembahasan terkait dengan strategi kebijakan Turki dalam perang Rusia-Ukraina tidak hanya dari sisi politik namun juga dari sisi ekonomi dan militer. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dari Breuning & Rosenau serta konsep strategic hedging dari Cheng-Chwee Kuik. Melalui pendekatan dari Cheng-Chwee Kuik dapat memberikan penjelasan terkait strategi kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

#### **2.4. Ringkasan Penerapan Teori**

Dengan melihat manuver dari kebijakan luar negeri Turki dalam konflik Rusia-Ukraina, bisa dilihat bahwasanya Turki mengambil kebijakan luar negeri secara “mendua” (strategic hedging) terhadap Rusia dan Ukraina. Penerapan strategic hedging dalam penelitian dilakukan dengan melihat tiga determinan dari kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina yaitu pembuat keputusan, ekonomi, dan militer. Hubungan antara Turki dengan Rusia dan

Ukraina karena dipengaruhi oleh pembuat keputusan dalam negeri Turki. Kemudian dalam determinan ekonomi, Turki menjalin hubungan dengan Rusia karena Rusia merupakan mitra penting bagi keberlangsungan perekonomian Turki. Sementara itu, dalam determinan militer, Turki menjalin hubungan dengan Ukraina karena Ukraina membutuhkan persenjataan dan dukungan diplomatik dari Turki.

Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa keputusan Turki menerapkan strategic hedging yaitu Turki ingin memperbaiki perekonomian negaranya sehingga Turki melakukan kerjasama dengan Rusia di berbagai sektor perekonomian yaitu di bidang pariwisata, energi, dan perdagangan. Sedangkan, Turki menjalin kerjasama dengan Ukraina di bidang militer dengan mengirimkan berbagai persenjataan dan dukungan secara diplomatik terhadap Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pengiriman persenjataan kepada Ukraina dan dukungan secara diplomatik tersebut dilakukan untuk memperbaiki citra Turki di mata para anggota NATO lainnya. Sehingga, Turki dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak terutama dari negara-negara Barat ketika menjalin suatu kerjasama.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penulis memakai jenis penelitian kualitatif dalam meneliti fenomena yang dikaji. Adapun penelitian kualitatif yakni penelitian yang memiliki tujuan dalam memahami sebuah fenomena mengenai apa yang tengah dialami oleh sebuah subjek penelitian menurut holistik, dan melalui cara deskripsi di dalam kata-kata serta bahasa, pada konteks yang alamiah sekaligus memanfaatkan metode-metode ilmiah (Anggito & Setiawan, 2018). Jenis penelitian kualitatif ini digunakan untuk memperoleh berbagai informasi tentang kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina secara mendalam serta menyeluruh. Selain itu, diharapkan juga bisa diungkapkan permasalahan dan kendala yang sedang dihadapi dalam penerapan kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

#### **3.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian berisi tentang rincian mengenai batasan materi dan waktu yang akan digali dalam suatu penelitian dengan tujuan agar analisis dari hasil penelitian bisa lebih terarah. Untuk membatasi penelitian saya yang mengenai kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina, maka yang akan menjadi fokus dari penelitian ini yaitu mengenai kebijakan luar negeri Turki dalam menghadapi Perang Rusia-Ukraina dan strategic hedging Turki dalam menghadapi Perang Rusia-Ukraina.

Batasan waktu merupakan waktu yang telah ditentukan peneliti untuk menganalisa suatu data yang dikumpulkan. Batasan waktu dalam penelitian ini adalah dari bulan Februari tahun 2022 hingga Februari 2023. Batasan awal ditentukan dari bulan Februari tahun 2022 karena terkait dengan dimulainya perang Rusia-Ukraina yang akan dilihat perkembangannya hingga satu tahun ke depan yakni di bulan Februari 2023.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Praktis”, Ahmad Tanzeh mengatakan bahwa pengumpulan data merupakan prosedur yang standar dan sistematis dalam memperoleh berbagai data yang digunakan (Tanzeh, 2011). Dalam penelitian ini, penulis memakai studi pustaka sebagai teknik dalam pengumpulan data. Studi pustaka menurut Tanzeh yaitu pengumpulan data melalui telaah buku-buku, catatan-catatan, laporan-laporan, & literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan suatu permasalahan yang ingin diselesaikan (Tanzeh, 2011). Dalam hal ini, penulis melakukan telaah dengan mencari data dari berbagai sumber seperti website pemerintah, portal berita, maupun jurnal ilmiah dan berfokus pada hal yang terkait dengan kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Yusup merupakan proses mencari serta menyusun data yang didapat dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dengan mengorganisasikan data serta memilih data yang penting sekaligus membuat kesimpulan, yang mana akan mudah dipahami baik diri sendiri ataupun orang lain. (Yusup, 2018). Proses dari analisis data dalam penelitian ini memakai metode analisis dari Milles & Huberman dengan melewati 3 langkah yakni:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data di dalam penelitian yang dikaji penulis yaitu data yang diperoleh mengenai kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina dengan melakukan telaah pada artikel, portal media, dan jurnal mengenai Perang Rusia-Ukraina dan keterlibatan Turki di dalamnya.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data di dalam penelitian secara kualitatif dilaksanakan dalam gambaran uraian, bagan, flowchart, hubungan di antara kategori, dan yang sejenis (Yusup, 2018). Mengenai hal tersebut, penelitian ini menyajikan data yaitu melalui teks naratif dengan menampilkan data. Penyajian data di dalam penelitian tersebut berfungsi memudahkan peneliti dalam memahami berbagai data yang

didapat. Dalam hal ini, data-data yang dapat menunjang teori-teori dari penelitian mengenai kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan (verifikasi). Kesimpulan di awal tetap bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan berbagai bukti yang cukup kuat dalam mendukung tahapan pengumpulan data selanjutnya (Yusup, 2018). Kesimpulan data bisa menanggapi rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal dimana kesimpulan tersebut berupa deskripsi ataupun gambaran tentang objek yang akan diteliti. Dengan demikian bisa di ketahui kebijakan luar negeri Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

### 3.5. Keabsahan Data

Pengujian terhadap keabsahan data, selain digunakan dalam menyanggah balik kepada yang menyatakan tidak ilmiah terhadap suatu penelitian yang sedang dilakukan, juga menjadi unsur penting dari penelitian kualitatif (Tanzeh, 2011). Dalam menjamin keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan triangulasi sumber data guna memastikan data-data yang diperoleh sifatnya akurat. Penulis mendapatkan data-data dalam penelitian ini dari buku, jurnal, hasil observasi, publikasi ilmiah, dan laporan penelitian. Penulis mengambil data dari buku, jurnal, hasil observasi, publikasi ilmiah, dan laporan penelitian yang bisa telusuri sumbernya. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya mendapatkan data-data dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber yang valid. Melalui berbagai sumber tersebut, penulis dapat melakukan triangulasi. Hal tersebut dapat membuat data-data yang digunakan mampu mendukung analisis dan dapat memberikan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

### 3.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian, maka sistematika penulisannya akan dipaparkan ke dalam 5 bab sebagai berikut:

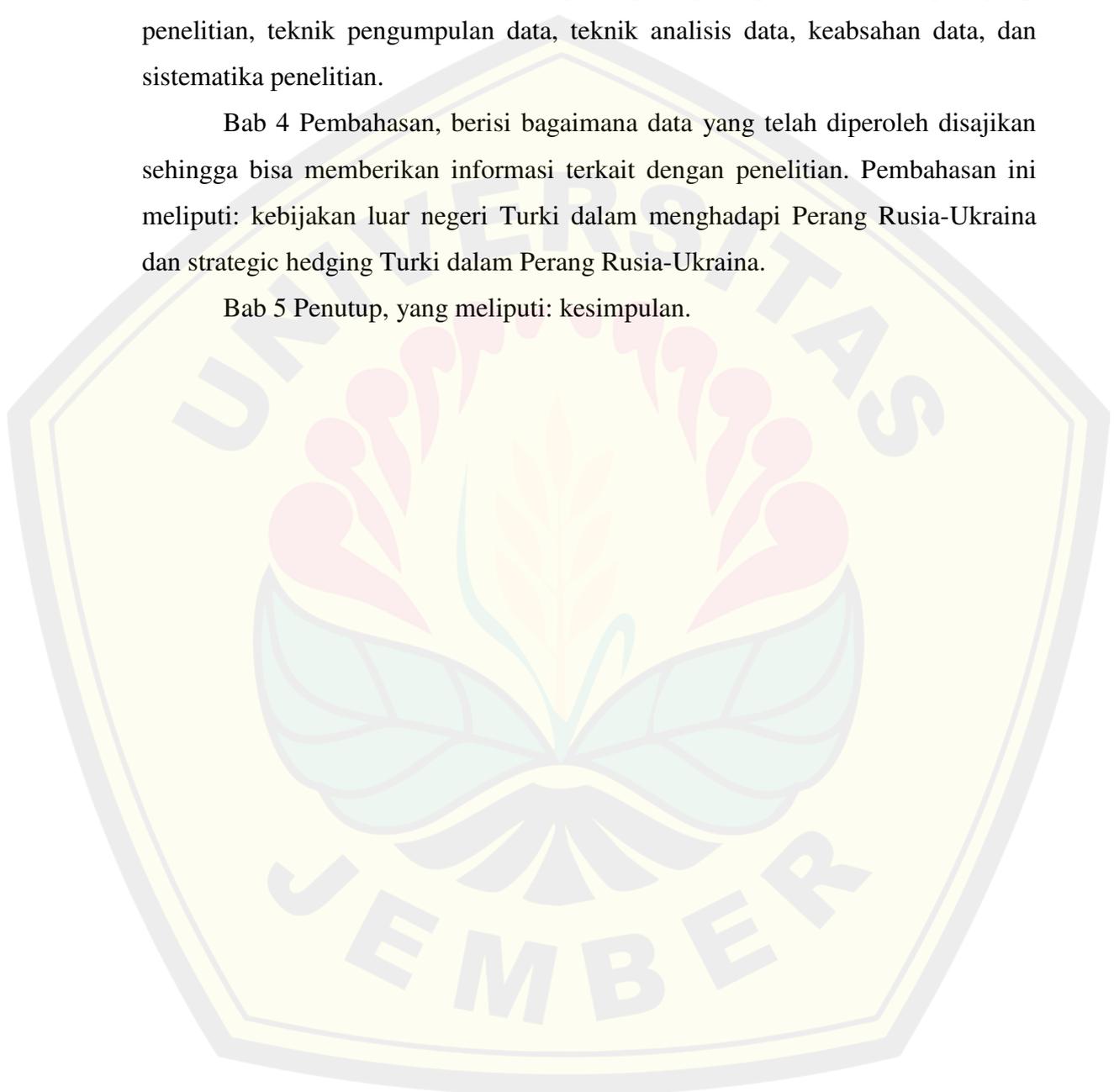
Bab 1 Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang meliputi: kerangka teori yang menjelaskan tentang foreign policy, kerangka pemikiran operasional penelitian yang menjelaskan tentang strategic hedging, tinjauan pustaka terdahulu, dan ringkasan penerapan teori.

Bab 3 Metode Penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan sistematika penelitian.

Bab 4 Pembahasan, berisi bagaimana data yang telah diperoleh disajikan sehingga bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian. Pembahasan ini meliputi: kebijakan luar negeri Turki dalam menghadapi Perang Rusia-Ukraina dan strategic hedging Turki dalam Perang Rusia-Ukraina.

Bab 5 Penutup, yang meliputi: kesimpulan.



## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Menghadapi Perang Rusia-Ukraina**

Kebijakan luar negeri Turki adalah produk dari beberapa proses yang saling terkait di tingkat global, regional, dan nasional. Bangkitnya populisme sayap kanan di Eropa dan masuknya Donald Trump ke tampuk kekuasaan di AS pada 2017 mengubah lanskap politik kawasan Euro-Atlantik, yang membentuk vektor kebijakan luar negeri Turki sepanjang paruh kedua abad ke-20. Namun setelah bulan Februari 2022, Turki tidak ikut-ikutan dengan Barat dan upaya mediasi Erdogan membantu meningkatkan pengaruh negara tidak hanya secara regional, tetapi juga secara global.

Banyak peneliti-peneliti yang menunjuk pada keseimbangan Turki terhadap berbagai mitra kebijakan luar negeri (Tayfun Ozberk, 2022). Dengan demikian, Turki tidak memihak dan berusaha meningkatkan peluang strategisnya dengan mengorbankan berbagai asimetri regional. Namun seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa pada awal 2020-an, kebijakan luar negeri Turki telah memasuki tahap yang berbeda secara kualitatif, menggabungkan berbagai elemen penyeimbangan dan, yang lebih penting, menerapkan strategic hedging. Kombinasi ini tidak hanya secara diskursif tetapi secara de facto memungkinkan Turki mempertahankan dan meningkatkan otonomi strategisnya dalam hubungan internasional.

Dalam menerapkan strategic hedging, Turki memerlukan beberapa kapabilitas untuk dapat melakukannya. Tessman dan Wolfe (2011) dalam bukunya yang berjudul "Great Powers and Strategic Hedging", memberikan tiga indikator dari strategic hedging yaitu pembuatan keputusan (decision-making), ekonomi (economy) dan militer (military). Tiga indikator dari strategic hedging tersebut bertujuan untuk melihat kapabilitas Turki dalam menerapkan strategic hedging.

#### 4.1.1. Dalam Bidang Pembuatan Keputusan

Hubungan antara Turki dengan Rusia memiliki banyak sisi dan sering disalahpahami. Turki dapat menjadi lawan Uni Soviet selama era Perang Dingin, namun disisi lain para elit di Turki juga menyadari pentingnya kedekatan negara itu dengan Rusia, dan berusaha untuk mengatur hubungan dengan para elit di Rusia (İşçi Onur, 2019). Dalam beberapa dekade setelah runtuhnya Uni Soviet, para elit dari partai pemenang di Turki saat ini Partai Keadilan & Pembangunan (AKP) telah memperdebatkan peran Turki dalam panggung internasional, aliansi negara tersebut dengan NATO, dan cara terbaik untuk memaksimalkan kepentingan Turki di negara-negara bekas Uni Soviet (İşçi Onur, 2019).

Partai Keadilan & Pembangunan (AKP) mengadopsi filosofi tersebut, dengan menggabungkan unsur-unsurnya dengan pandangan Islam tentang kolonialisme dan identitas di Timur Tengah (Stein Aaron, 2015). AKP pun mencari tujuan bersama dengan partai lainnya salah satunya yaitu partai MHP sebagai partai sayap kanan dalam politik Turki. Dimana, mereka berargumen bahwa aliansi Turki dengan Barat dapat merugikan masa depan negaranya. Oleh karena itu, Turki harus mengeksplorasi hubungan yang lebih dalam dengan Rusia dan dengan negara-negara yang memiliki etnis Turki di dalamnya (Stein Aaron, 2015).

Krisis di Ukraina telah menghidupkan kembali relevansi geopolitik antara Turki dan NATO. Dalam beberapa tahun terakhir, skeptisisme Barat terhadap Turki mengenai keanggotaan mereka di NATO telah tumbuh secara signifikan. Ada banyak alasan untuk ini, misalnya: NATO menjadi sasaran bagi para pendukung Erdogan di Turki sebagai buntut dari upaya kudeta pada tahun 2016 (Stein Aaron, 2015). Para elit dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa menuduh keterlibatan NATO, tanpa memberikan sedikit pun bukti, dan bahkan menyebutnya sebagai “organisasi teror” (Stein Aaron, 2015). Tuduhan ini telah dipupuk secara berkala oleh para anggota kabinet dari Presiden Erdoğan.

Namun, dengan aneksasi Krimea oleh Rusia yang mengancam akan mengubah keseimbangan di Laut Hitam, Turki meningkatkan upayanya untuk mendukung kerja sama dengan NATO di wilayah tersebut (Stein Aaron, 2015).

Angkatan laut dan udara Turki secara teratur berpartisipasi dalam latihan, dimana baru-baru ini Turki ikut berpartisipasi dalam acara NATO yaitu Air Defender 2023 di Jerman. Selain itu, terlepas dari hubungannya Rusia, Turki terus-menerus mendukung perluasan NATO termasuk persetujuan dimasukkannya Finlandia ke NATO (Stein Aaron, 2015).

Selama konflik di Ukraina, Turki berhasil dalam mempertahankan otonomi strategisnya dan menghindari keberpihakan pada Barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sambil tetap mempertahankan hubungannya dengan kedua belah pihak yang bertikai tanpa membahayakan geostrategisnya sendiri (İşçi Onur, 2019). Turki berhasil memosisikan dirinya, tidak hanya di antara Rusia dengan Ukraina namun juga antara Rusia dengan Barat, dan bahkan secara global antara Barat dan banyak negara non-Barat yang memilih untuk netral (İşçi Onur, 2019). Penting untuk memahami peran Turki dalam perang dan apa yang telah menentukan kebijakan luar negeri strategisnya terhadap barat. Penentu terpenting adalah lokasi geografis Turki diikuti oleh hubungan historis dan transaksionalnya dengan Barat dan Rusia. Selain itu, di level individu juga mempengaruhi aliansi strategis dan kebijakan luar negerinya (İşçi Onur, 2019).

Letak geografis Turki di kawasan Laut Hitam memiliki determinan yang paling berpengaruh dalam kebijakan luar negeri dan posisi strategisnya. Hal ini karena Laut Hitam menghubungkan Eropa Timur-Afrika Utara dan Timur Tengah. Laut Hitam memiliki lebih dari sepuluh pelabuhan utama (İşçi Onur, 2019). Posisi geografis Turki ini dieksploitasi oleh NATO. Hal ini karena Laut Hitam merupakan zona yang digunakan untuk perang melawan Rusia dan zona penyangga untuk menahan dan memperlambat masuknya pengungsi dari Afrika Utara dan Timur Tengah ke Eropa Timur (İşçi Onur, 2019). Untuk Rusia, Turki menyediakan jalur di Laut Hitam untuk pengangkutan barang dan kapalnya. Keberadaan Turki dalam geografi ini juga mencakup tantangan seperti perang di Suriah, ketegangan dengan Armenia, dan perang melawan etnis Kurdi (İşçi Onur, 2019). Dan sekarang dengan perang Rusia-Ukraina saat ini, tidak dapat dihindari bahwa Turki harus mengambil berbagai pendekatan untuk menjaga keseimbangan antara Ukraina, NATO, dan Rusia.

Turki telah menjadi anggota NATO selama lebih dari 70 tahun. Turki menjadi kontributor dalam misi NATO di negara lain seperti di Afghanistan (Stein Aaron, 2015). Namun, Turki dapat dikatakan sebagai “sekutu yang tidak dapat diprediksi,” karena sering mendapat tuntutan dari AS dan aliansi yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan domestiknya (Stein Aaron, 2015). Turki juga tidak menawarkan stabilitas kepada tetangga NATO lainnya. Perselisihan antara Turki dengan Yunani atas Siprus dan batas laut terjadi, terlepas dari fakta bahwa Yunani juga merupakan anggota NATO (Stein Aaron, 2015). Selain itu, ketegangan di sepanjang garis kontrol di wilayah utara Suriah memiliki kemungkinan berubah menjadi konfrontasi langsung dengan pemerintah Assad yang didukung oleh Rusia dan Pasukan Pemberontak Suriah (SDF) yang didukung oleh AS (Stein Aaron, 2015).

Turki juga menjadi negara NATO yang memiliki hubungan yang relatif bersahabat dengan Rusia dan telah menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Rusia selalu menjadi mitra ekonomi dan keamanan yang lebih berharga bagi Turki daripada Ukraina. Turki bersedia untuk mengabaikan tidak hanya Ukraina tetapi juga pendapat dari kolega NATO-nya untuk memajukan kepentingan nasionalnya, seperti yang terjadi ketika Turki setuju untuk bergabung dengan proyek pipa TurkStream dengan Rusia pada tahun 2016 (Tayfun Ozberk, 2022).

Selain tujuan nasional, faktor individu juga memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri. Presiden Turki, Erdogan dan Presiden Rusia, Putin memiliki hubungan yang kompleks. Mereka berdua bekerja sama secara terbuka tetapi di saat yang sama juga bersebrangan dalam konflik di Suriah dan Libya (Tayfun Ozberk, 2022). Bagi Rusia, Turki telah menjadi pelabuhan yang aman, satu-satunya negara di Eropa yang menyambut bisnis dan turis Rusia. Bagi Turki, Rusia menjadi mitra dagang yang berharga dan sumber uang bagi Turki. Usaha untuk memediasi Ukraina dan Rusia, terutama perjanjian ekspor biji-bijian, telah meningkatkan prestise internasionalnya secara signifikan. Erdoğan akan memanfaatkan hilangnya kekuasaan Rusia yang sudah terlihat di negara-negara bekas Uni Soviet dan di wilayah Kaukasus untuk mendorong Turki dalam mengisi

kekosongan kekuasaan di sana dan lebih jauh memajukan kebijakan hegemonik Turki (Alan Fisher, 2022).

Presiden Erdogan juga memiliki ambisi terkait kepemimpinannya. Dia mendapat manfaat dari citra pemimpin global di dalam negeri dan dia telah memutuskan kebijakan strategic hedging untuk Turki dalam Perang Rusia-Ukraina. Ini memungkinkan dia untuk melibatkan pejabat Rusia dan Ukraina selama perang tersebut. Penguasaan kebijakan luar negeri presiden Turki adalah bahwa ia mahir mengubah apa yang baik untuk Turki menjadi apa yang baik untuk Erdogan (Alan Fisher, 2022). Elit kebijakan luar negeri Turki juga menghargai kebijakan yang secara formal netral terhadap perang, yang memungkinkan Turki untuk memainkan peran dalam konflik tersebut (Alan Fisher, 2022).

Sejalan dengan itu, Turki menutup Selat Turki untuk kapal angkatan laut Rusia, Ukraina, dan negara lain pada awal perang pada 28 Februari 2022 (Tayfun Ozberk, 2022). Sekilas, larangan ini tampaknya bertentangan dengan kepentingan Rusia. Sementara Ukraina tidak memiliki kapal angkatan laut di luar Selat yang dapat berlayar ke Laut Hitam, lebih dari setengah armada Laut Hitam Rusia saat ini berada di Mediterania (Tayfun Ozberk, 2022). Sekilas, bagaimanapun, kebijakan tersebut juga menguntungkan Rusia. Dimana, larangan tersebut mencegah negara-negara anggota NATO untuk berlayar dengan kapal angkatan laut mereka ke Laut Hitam untuk membantu Ukraina.

Kebijakan hubungan yang mendua (strategic hedging) juga memungkinkan Turki untuk menjaga saluran komunikasi supaya tetap terbuka dengan Ukraina dan Rusia, misalnya menyatukan pejabat Rusia dan Ukraina dalam pembicaraan tentang gencatan senjata selama fase awal konflik pada bulan Maret 2022 di kota Antalya, Riviera Turki (Tuvan Gumrukcu & Ezgi Erkoyun, 2022). Meskipun upaya itu gagal, pada 22 Juli 2022 Turki berhasil menjadi perantara dari kesepakatan “Grain Initiative”, mengamankan persetujuan dari Rusia dan Ukraina untuk memungkinkan ekspor gandum dan biji-bijian dari pelabuhan Laut Hitam, melalui Selat Turki, ke negara lain (Alan Fisher, 2022). Kesepakatan ini, yang mendapat pujian dari AS dan pejabat anggota NATO

lainnya karena membantu dalam mengurangi risiko keamanan pangan global, menggarisbawahi keseimbangan yang berhasil dicapai dengan menempatkan pemerintah Turki di antara NATO, Rusia, dan Ukraina selama perang tersebut (Alan Fisher, 2022).

#### **4.1.2. Dalam Bidang Ekonomi**

Keberlangsungan "new economic model" (sebuah kebijakan untuk memerangi inflasi tanpa menaikkan suku bunga bank sentral) yang diperkenalkan oleh pemerintah Turki sudah diragukan oleh banyak pihak sebelum terjadinya serangan Rusia ke Ukraina (Ebru Tuncay & Birsen Altayli, 2023). Saat ini dengan adanya Perang Rusia-Ukraina, hal tersebut dapat merusak rencana dari Turki untuk menjembatani defisit neraca berjalannya dengan mempromosikan pertumbuhan yang berfokus pada ekspor dan menstabilkan mata uangnya yang terpukul oleh dollar dengan menjaga deposito lira (Ebru Tuncay & Birsen Altayli, 2023). Dengan inflasi konsumen tahunannya yang sudah lebih dari 54% pada tahun 2022, Turki akan menghadapi beberapa pukulan terberat dari konflik tersebut karena Rusia merupakan salah satu mitra utama ekonominya, dengan hubungan di bidang pariwisata, perdagangan, dan energi (Ebru Tuncay & Birsen Altayli, 2023).

Dalam industri pariwisata Turki, yang berharap untuk bangkit kembali ke tingkat sebelum terjadinya Covid-19. Orang Rusia merupakan wisatawan asing terbesar di Turki pada tahun 2021, berjumlah sekitar 4,7 juta atau 19% dari seluruh turis yang berkunjung ke Turki (Paul B. Osterlund, 2022). Turki mengharapkan pendapatan pariwisata sebesar \$35 miliar pada tahun 2023, naik dari \$24,5 miliar pada tahun 2021 yang mana setara dengan pendapatannya pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda (Paul B. Osterlund, 2022).

Beberapa perwakilan industri pariwisata di Turki berpegang teguh pada harapan bahwa krisis Ukraina dapat segera diselesaikan dan beberapa pemesanan yang dibatalkan dapat diperbarui. Seorang konsultan investasi pariwisata di Antalya, pusat wisata utama Turki di pantai Mediterania, mengatakan bahwa perencanaan sektor pariwisata untuk tahun 2022, berdasarkan target pendapatan

\$35 miliar, "telah terbalik" dengan adanya perang (Paul B. Osterlund, 2022). Selain itu, Eksekutif asosiasi pariwisata juga mengatakan bahwa, "Sektor pariwisata sedang menunggu dalam ketidakpastian. Sektor pariwisata diharapkan untuk melampaui kinerja 2019 dan memecahkan rekor baru pada 2022 asalkan krisis Rusia-Ukraina dapat segera diselesaikan (Paul B. Osterlund, 2022).

Meskipun Turki bukan bagian dari kelompok Barat yang menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, namun Turki mendapat beberapa gangguan. Gangguan tersebut berupa pembatasan jalur lalu lintas udara internasional dan pembatasan sistem pembayaran bagi Rusia. Menurut para ahli, permasalahan sistem pembayaran tersebut dapat diselesaikan dengan mengalihkan pembayaran ke bank-bank Rusia yang tidak tunduk pada larangan dari SWIFT (Paul B. Osterlund, 2022). Tujuan ambisius dari Turki untuk dapat surplus untuk neraca berjalannya, yang oleh para pejabat Turki gambarkan sebagai kunci stabilitas harga, tampaknya tidak dapat berhasil di tengah kenaikan harga energi global, yang dipicu oleh Perang Rusia-Ukraina (Paul B. Osterlund, 2022). Terlebih, Perekonomian Turki bergantung terhadap impor energi, yang biayanya telah melonjak drastis karena terjadinya depresiasi terhadap mata uang Lira Turki.

Rusia merupakan pemasok energi utama Turki, memenuhi lebih dari 33% kebutuhan gas alam Turki (Sebnem Turhan, 2022). Hubungan antara Turki dan Rusia bertumpu pada warisan sejarah dari kedua belah pihak. Peluang dan perspektif baru untuk kerja sama muncul setelah berakhirnya Perang Dingin (Paul B. Osterlund, 2022). Menyusul perkembangan pesat kerjasama ekonomi pada tahun 1990-an, hubungan bilateral memasuki fase baru pada awal tahun 2000-an dengan dialog yang erat antara kepemimpinan kedua negara, dan mencapai kelembagaan dengan pembentukan Dewan Kerjasama Tingkat Tinggi (HLCC) di tahun 2010 (Paul B. Osterlund, 2022).

Pada bulan Februari 2022, impor dari Rusia melampaui berbagai impor energi Turki dari berbagai negara (Sebnem Turhan, 2022). Impor energi tersebut menelan biaya sekitar \$8 miliar pada bulan Februari 2022 dari total impor sebesar \$28,1 miliar, dan defisit perdagangan luar negeri Turki mencapai \$8,1 miliar, meningkat 142% dari periode yang sama pada tahun 2021 lalu (Sebnem Turhan,

2022). Harga minyak melonjak lebih dari 20% menjadi lebih dari \$115 per barel pada bulan Februari 2022, level yang tidak terlihat selama bertahun-tahun. Setiap kenaikan harga minyak sebesar \$10 menambah \$5 miliar pada defisit neraca berjalan Turki, menurut perhitungan para ekonom (Sebnem Turhan, 2022). JP Morgan pun menggandakan perkiraan defisit transaksi berjalan Turki untuk tahun 2022 menjadi 2,2% dari produk domestik bruto (PDB) (Sebnem Turhan, 2022). Sementara itu Goldman Sachs juga telah merevisi perkiraannya menjadi 2,5% dari 1,5% dari PDB di tahun 2022 (Sebnem Turhan, 2022).

Gangguan dalam rantai pasokan energi dan berbagai kendala yang mempengaruhi ekspor menjadi tantangan ekonomi bagi Turki. Perang Rusia-Ukraina telah melumpuhkan jalur transportasi barang dari Turki menuju Rusia maupun sebaliknya. Bahkan dengan rute alternatif dengan melalui perbatasan Georgia, membuat harga barang melonjak sekitar 50% di bulan Agustus (Sebnem Turhan, 2022). Selain itu, perang di Ukraina juga berdampak pada industri tekstil dan kulit di Istanbul, yang sangat bergantung pada pembeli Rusia dan Ukraina (Paul B. Osterlund, 2022). Menurut perwakilan bisnis di distrik Laleli, pesanan terhadap garmen dan perdagangan koper senilai lebih dari \$200 juta telah dibatalkan dalam hitungan hari pada bulan September 2022 (Paul B. Osterlund, 2022).

Pasar Rusia dan Ukraina menyumbang 40% dari penjualan senilai \$3 miliar di tahun 2021. Perang yang berlarut-larut mengancam kerugian miliaran dolar bagi produsen di sektor tersebut (Paul B. Osterlund, 2022). Defisit perdagangan luar negeri negara itu (bagian paling penting dari neraca pembayaran) meningkat 186,3% yoy menjadi sekitar \$18,4 miliar dalam dua bulan pertama pada tahun 2021, terutama karena melonjaknya biaya energi (Sebnem Turhan, 2022). Harga makanan juga meroket di Turki dan terus melonjak sejak invasi, contohnya adalah gandum. Rusia menjadi pengekspor gandum utama bagi Turki. Akibat dari perang tersebut, membuat harga gandum Rusia menjadi lebih mahal sekitar 10%-15% pada bulan September (Sebnem Turhan, 2022). Seperti halnya harga dari bahan bakar, menjadi pertanda kenaikan harga lebih lanjut secara keseluruhan. Bahkan sebelum perang, inflasi konsumen

tahunan Turki melonjak hingga 54,4% dan inflasi produsen mencapai 105%, dengan harga energi dan makanan memimpin kenaikan di tahun 2021 (Sebnem Turhan, 2022). Setiap kenaikan harga minyak sebesar \$10 mendorong inflasi konsumen Turki naik sebesar 1,5 poin persentase, menurut perhitungan para ekonom (Sebnem Turhan, 2022).

Dengan Rusia pengeksportir gandum utama, perang telah mengirim harga gandum global ke tingkat rekor, mengancam akan memperburuk inflasi pangan secara global. Selain itu, ketakutan akan kekurangan minyak bunga matahari juga mengancam Turki (Sebnem Turhan, 2022). Turki merupakan importir biji bunga matahari terbesar di dunia, dan Rusia serta Ukraina memasok 70% dari impor minyak bunga matahari. Setidaknya 15 kapal yang membawa minyak bunga matahari mentah ke Turki dilaporkan terdampar di Laut Hitam (Sebnem Turhan, 2022). Dalam sebuah surat kepada otoritas pemerintah, kepala Asosiasi Industri Minyak Nabati Turki menyerukan tindakan untuk mengamankan jalur kapal, memperingatkan bahwa stok yang ada akan memenuhi kebutuhan negara paling lambat pada pertengahan April (Sebnem Turhan, 2022). Selain itu, harga minyak bunga matahari mentah melonjak menjadi lebih dari \$2.000 per ton dari \$1.400 sebelum perang yakni di tahun 2021 (Sebnem Turhan, 2022).

Selain itu, pembangunan pipa gas TurkStream di bawah Laut Hitam menjadi penanda hubungan Rusia-Turki. TurkStream memainkan peran khusus dalam kerja sama ekonomi yang dibuat oleh Rusia dan Turki, meskipun tidak memiliki cadangan energi yang besar, namun merupakan salah satu pemain kunci di pasar energi global. Pada akhir tahun 2010-an, Turki telah mengkonsolidasikan perannya sebagai negara transit terpenting untuk ekspor hidrokarbon dari kawasan Laut Kaspia ke Eropa (Bulgaria, Serbia, dan Hongaria) (Sebnem Turhan, 2022). Selain itu, pembangunan pipa gas tersebut juga memungkinkan Turki untuk menikmati diskon gas yang dipasok dari Rusia sambil terus mengeksplorasi rute alternatif transit minyak dan gas dari Asia Tengah ke Barat.

Ketika AS dan UE memberikan sanksi pada sektor energi Rusia, Rusia dan Turki meningkatkan kerja sama energi mereka. Pada Oktober 2022, Presiden Putin mengusulkan gagasan untuk membuat pusat gas internasional menggunakan

TurkStream (Sebnem Turhan, 2022). Peserta dalam proyek ini akan dapat menetapkan kondisi harga untuk pipa dan gas cair dalam waktu dekat, yang berpotensi memungkinkan Turki untuk menyatukan pemasok yang berbeda pada satu platform, sehingga secara signifikan memengaruhi harga di pasar dunia.

#### **4.1.3. Dalam Bidang Militer**

Ukraina memproduksi barang-barang yang tidak dimiliki oleh Turki. Turki memproduksi peralatan militer yang tidak dimiliki Ukraina dan peralatan tersebut memberikan nilai penting dalam perjuangan Ukraina dalam melawan agresi Rusia (Michael Weiss & James Rushton, 2023). Kemitraan ini, bagaimanapun, tidak secara inheren anti-Rusia. Turki juga memiliki hubungan fungsional dengan Rusia dan berusaha mempertahankannya untuk mengelola krisis regional.

Turki tidak mengakui reunifikasi Krimea dengan Rusia pada 2014 atau kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, dan memperkuat hubungan dengan Ukraina dalam kerangka High-Level Cooperation Council. Pada tahun 2015, Turki mengumumkan pencairan \$10 juta dalam bantuan kemanusiaan dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama militer dengan Ukraina pada tahun 2020 (Cook A. Steven, 2022). Setelah itu, diikuti oleh zona perdagangan bebas dengan Ukraina pada tahun 2022 (Cook A. Steven, 2022).

Selain itu, perusahaan Turki Baykar Makina berencana membangun pabrik pembuatan drone di Ukraina, dan membuat pusat teknologi kedirgantaraan Turki-Ukraina bersama. Ukraina berharap untuk menggunakan teknologi Turki dalam produksi drone Sokol-300 di Biro Desain Luch (Ilayda Nijhar, 2022). Turki menyelesaikan kontrak impor mesin Ukraina untuk drone tempur strategisnya dan mengembangkan beberapa proyek bersama untuk memasang mesin Ukraina pada drone berat Bayraktar Akıncı. Proyek bersama ambisius lainnya membayangkan pengembangan drone tempur supersonic (Ilayda Nijhar, 2022). Turki juga menjadi salah satu mitra utama dalam pengembangan Angkatan Laut Ukraina dengan menandatangani kontrak untuk membangun korvet untuk Ukraina.

Hubungan militer tersebut menjadi hal yang penting bagi Turki. Turki telah terlibat dalam banyak konflik bersenjata. Perang di Suriah, Libya, dan

Nagorno-Karabakh tidak hanya memajukan kepentingan strategis Turki tetapi juga bertindak sebagai tempat pembuktian untuk senjata modern Turki. (Michael Weiss & James Rushton, 2023). Namun Turki tetap menjadi satu-satunya negara NATO yang menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Bagi Ukraina, Turki dianggap sebagai sekutu yang penting. Hal ini karena yang paling penting bagi Ukraina yaitu adanya pengiriman senjata yang terus berlanjut ke negaranya. Menurut Ömer Özkizilcik, seorang analis kebijakan luar negeri dan keamanan yang berbasis di Turki. Ia mengatakan bahwa “Bersama dengan Inggris, Turki memberi Ukraina dukungan militer paling signifikan sebelum invasi Rusia terhadap Ukraina. Sejak itu, Turki telah meningkatkan bantuan militernya ke Ukraina mulai dari rompi hingga beberapa peluncur roket terutama drone Bayraktar TB2 yang menjadi senjata andalan Turki” (Michael Weiss & James Rushton, 2023).

Turki menjadi terkenal karena kendaraan drone tempur (UCAV), termasuk Bayraktar TB2 yang dikembangkan oleh perusahaan drone Baykar. Drone tersebut memperlihatkan bagaimana pesawat nirawak merevolusi perang modern saat ini dan kinerja TB2 dalam melawan pasukan Rusia telah membuat banyak negara mempertimbangkan untuk membeli UCAV tersebut (Michael Weiss & James Rushton, 2023). TB2 juga menjadi faktor kunci dalam pertempuran di Irak, Suriah, Nagorno-Karabakh, Libya, dan Ukraina yang menjadi senjata bagi pertahanan global Turki (Michael Weiss & James Rushton, 2023).

Selama Pertempuran Kyiv, TB2 memanfaatkan sifat tergesa-gesa dari gerak maju Rusia ke ibu kota Ukraina, menerbangkan serangan tempur berulang kali di atas posisi Rusia, menghancurkan sistem pertahanan udara, pusat komando dan kendali, serta truk bahan bakar (Michael Weiss & James Rushton, 2023). Meskipun TB2 sebagian besar ditarik dari medan perang ketika pertahanan udara dan peperangan elektronik Rusia mulai beroperasi, namun drone TB2 masih digunakan untuk menyerang target di wilayah yang terisolasi seperti di Snake Island, di lepas pantai Odesa (Michael Weiss & James Rushton, 2023). Selain itu, TB2 kembali ke medan pertempuran setelah pertahanan udara Rusia mulai ditekan oleh rudal anti-radiasi AGM-88 HARM yang diam-diam dipasok ke Ukraina oleh

Amerika Serikat pada bulan Januari tahun 2023 (Michael Weiss & James Rushton, 2023).

Sejak bulan Maret 2022, Turki telah memasok Ukraina 32 drone TB2 yang dipasok oleh perusahaan Baykar Tech ke Ukraina (Tayfun Ozberk, 2022). Selain itu, sekitar 5 drone TB2 dikirim di bulan Agustus 2022 oleh Baykar Tech ke Ukraina setelah Lituania, Polandia, dan Ukraina berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli drone tersebut. Salah satu pasokan terbesar dari satu model kendaraan lapis baja oleh negara non-Amerika, adalah 200 pengangkut personel lapis baja Kirpi MRAP yang dikirim oleh Turki kepada Ukraina Pada bulan Agustus 2022 (Tayfun Ozberk, 2022). Dibandingkan dengan bantuan militer Amerika dan Eropa yang diberikan ke Ukraina, pengiriman senjata Turki relatif tidak signifikan. Meskipun begitu, pada bulan-bulan awal perang, ketika bantuan Barat terbatas pada rudal anti-Tank dan anti-udara jarak pendek, drone Turki memainkan peran penting, termasuk dalam menenggelamkan kapal andalan Rusia di Laut Hitam pada 14 April 2022 (Tayfun Ozberk, 2022).

Menurut Oryx (kelompok riset yang membahas intelijen suatu negara), Turki telah mengirim pasokan militer ke Ukraina di luar drone tempur dan persenjataan lainnya secara sembunyi-sembunyi (Tayfun Ozberk, 2022). Hal ini karena Turki berkeinginan untuk menjaga agar bantuan militernya ke Ukraina tetap terjaga dan di sisi lain juga dekat dengan Rusia. Sikap Turki dalam perang ini, mengarah ke tuduhan bahwa Turki “bermain dua kaki” dengan Rusia dan Ukraina (Tayfun Ozberk, 2022).

Kerja sama ekonomi Turki dengan Rusia memungkinkannya menemukan beberapa solusi jangka pendek dengan meninggalkan dampak negatif pada persepsi publik tentang Turki di Ukraina dan NATO (Joseph Massad, 2022). Menurut jajak pendapat baru-baru ini oleh *New Europe Center*, tingkat ketidakpercayaan terhadap Erdogan di antara orang Ukraina telah melonjak dari 19,5 persen pada tahun 2021 menjadi 46,6 persen pada tahun 2022 (Joseph Massad, 2022). Di sisi lain, beberapa ekonom telah memperingatkan bahwa memperdalam hubungan dengan ekonomi Rusia dapat menyeret Turki ke dalam bencana ekonomi. Meskipun perdagangan Rusia-Turki berlipat ganda antara

tahun 2021 dan 2022, mencapai \$68,1 miliar, pasar terbesar Turki tetap di Uni Eropa dengan perdagangan \$196,4 miliar pada tahun 2022, menjadikan hubungan Turki dengan mitra Eropa sebagai prioritas utama (Joseph Massad, 2022).

Selain itu, menurut Jeffrey mantan duta besar AS, mengatakan bahwa Turki ingin “menetralkan Krimea,” semenanjung Ukraina di Laut Hitam yang direbut secara ilegal oleh Putin pada tahun 2014 (Joseph Massad, 2022). Persaingan Turki serta Rusia untuk memperebutkan pengaruh di Krimea telah berlangsung berabad-abad. Sebuah perang pernah terjadi di semenanjung tersebut dari tahun 1853 hingga 1856 antara pasukan tsar Rusia dengan aliansi Barat yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Kekaisaran Ottoman yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Republik Turki modern saat ini (Joseph Massad, 2022).

Perang di Ukraina juga menjadi sebuah laboratorium untuk menguji teknologi militer milik Turki terkini. Turki telah mencapai lompatan dalam industri pertahanannya selama dekade terakhir di berbagai platform, amunisi, dan kemampuan. Drone bersenjata, korvet, dan kendaraan berat lapis baja hanyalah beberapa contoh dari pertumbuhan ini. Pada tahun 2022, ekspor pertahanan dan kedirgantaraan Turki mencapai volume lebih dari \$4 miliar, sedangkan target untuk tahun 2023 ditetapkan menjadi \$6 miliar (Joseph Massad, 2022).

Pada 27 Februari 2022, tiga hari setelah invasi Rusia, Turki membatasi pergerakan angkatan laut Rusia di Laut Hitam dengan menerapkan Pasal 19 Konvensi Montreux 1936 yang bertujuan untuk menutup selat Bosporus dan Dardanelles untuk kapal perang Rusia mana pun yang belum berbasis di selat tersebut (Tayfun Ozberk, 2022). Akibatnya, Armada Laut Hitam Rusia yang bemarkas di Krimea, tidak dapat bergabung dengan kapal perang Rusia lainnya yang tengah mencari transit melalui saluran air yang dikuasai Turki (Tayfun Ozberk, 2022).

Pembatasan Konvensi Montreux merupakan topik yang diangkat beberapa negara dalam upaya mengubah status quo untuk keuntungan mereka. Beberapa bertujuan untuk melonggarkan aturan yang membatasi jalur angkatan laut non-Laut Hitam, sementara yang lain ingin menghapus konvensi itu sama sekali dan menggantinya dengan alternatif yang lebih menguntungkan (Michael Weiss &

James Rushton, 2023). Misalnya, Rusia ingin melonggarkan konvensi agar memungkinkannya untuk memproyeksikan armada lautnya ke perairan yang lebih hangat. Namun ketika Rusia sedang melemah dalam perang di Ukraina, Rusia mencoba untuk mempertahankan konvensi agar jangan sampai angkatan laut NATO mengisi kekosongan dan mengeksploitasi kawasan di Laut Hitam tersebut. Demikian pula, AS tertarik untuk merevisi konvensi untuk memungkinkan unit angkatan lautnya, termasuk kapal induk menuju kawasan Laut Hitam. Pemerintah Turki menolak upaya untuk mengubah status quo ini dan sebelumnya telah menegaskan bahwa “Turki mematuhi Montreux sampai menemukan alternatif yang lebih baik” (Michael Weiss & James Rushton, 2023).

Turki juga telah melakukan intervensinya di wilayah Laut Hitam dalam hal kemanusiaan, setelah berulang kali berbicara tentang perlunya Rusia menarik diri dari semua wilayah Ukraina yang diduduki, termasuk Krimea (Joseph Massad, 2022). Populasi minoritas Muslim Turki di Krimea (Tatar Krimea) sejak pengambilalihan Krimea oleh Rusia, telah ditindas oleh Rusia sebagaimana disampaikan oleh Human Rights Watch (Joseph Massad, 2022). Pemimpin Tatar Krimea Mustafa Dzhemilev juga sering kali bertemu dengan Erdogan di Turki untuk menyampaikan penindasan tersebut (Joseph Massad, 2022). Erdogan menegaskan bahwa Krimea harus dikembalikan ke pemiliknya yang sah yaitu orang-orang Tatar Krimea, dalam wawancara yang dilakukan dengan PBS (Joseph Massad, 2022). Ini terjadi tak lama setelah Erdogan bertemu dengan Putin di Uzbekistan pada bulan September 2022 di KTT SCO (Joseph Massad, 2022).

Pengaruh diplomatik dari Turki juga membantu pihak Ukraina dengan menciptakan perjanjian “Black Sea Grain Initiative”. Perjanjian “Grain Initiative” yang dinegosiasikan di Istanbul antara diplomat Ukraina dan Rusia secara tidak langsung melalui PBB pada bulan Juli 2022 (Michael Weiss & James Rushton, 2023). Perjanjian ini bertujuan untuk mengangkat blokade dari angkatan laut Rusia pada ekspor biji-bijian Ukraina ke negara-negara asing, yang mana menjadi sumber utama ekonomi Ukraina (Michael Weiss & James Rushton, 2023).

Pada 29 Oktober 2022 sejak serangan drone dari Ukraina terhadap kapal laut Rusia di Krimea, Rusia mengumumkan mengundurkan diri dari kesepakatan

biji-bijian yang ditengahi Turki. Turki dan Ukraina bersatu dalam mengumumkan partisipasi mereka dalam berlanjutnya kesepakatan biji-bijian tersebut, yang pada dasarnya menyebut bahwa Putin hanya mengertak. Rusia tiga hari kemudian, mengklaim bahwa Kementerian Pertahanan Rusia menerima “jaminan tertulis” dari Turki bahwa rute yang digunakan untuk mengangkut biji-bijian tidak akan digunakan Ukraina untuk melakukan operasi militer melawan Rusia (Michael Weiss & James Rushton, 2023). Menurut Özkizilcik mengenai perjanjian tersebut, mengatakan bahwa “Erdogan mengeksploitasi Putin dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan ekonomi yang menguntungkan sambil secara tidak langsung membunuh tentara Rusia di Ukraina” (Michael Weiss & James Rushton, 2023).

Sederhananya, Turki tidak akan membiarkan Ukraina jatuh di bawah kendali Rusia. Untuk strategi ini, Turki mendukung Ukraina secara militer dan akan terus melakukannya selama perang berkecamuk. Hal ini berakar pada pandangan Turki terhadap Ukraina sebagai sekutu penting dalam perimbangan kekuatan di sekitar Laut Hitam. Satu-satunya akses maritim ke Laut Hitam adalah melalui Selat Turki (yaitu Bosphorus, di mana Istanbul berada, dan Dardanella). Konvensi Montreux 1936, yang mengatur akses maritim ke Laut Hitam, telah menetapkan Turki sebagai semacam penjaga gerbang Laut Hitam (Michael Weiss & James Rushton, 2023).

Konvensi tersebut hanya mengizinkan negara-negara pesisir (Bulgaria, Georgia, Rumania, Rusia, Ukraina, dan Turki) untuk mempertahankan angkatan laut yang besar dan permanen di Laut Hitam (Michael Weiss & James Rushton, 2023). Dari negara-negara ini, hanya Rusia serta Turki yang memiliki armada laut yang besar. Dengan Rusia menjadi musuh bersejarah Turki dan kekuatan militer yang lebih besar jika dibandingkan dengan Turki, Turki memupuk hubungan baik dengan empat negara bekas Uni Soviet di Laut Hitam untuk membangun blok penyeimbang melawan Rusia di sekitar Laut Hitam. Dalam hal ini, Ukraina, negara Laut Hitam terbesar ketiga berdasarkan populasi dan wilayah setelah Turki dan Rusia dan terbesar keempat berdasarkan ukuran ekonominya, tampak sangat besar dalam pemikiran strategis Turki (Michael Weiss & James Rushton, 2023).

Turki telah mempertahankan hubungan baik dengan Ukraina sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1991 (Michael Weiss & James Rushton, 2023).

#### **4.2. Strategic Hedging Turki dalam Perang Rusia-Ukraina**

Perang di Ukraina telah mencapai jalan buntu dengan tidak ada pihak yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan besar di medan pertempuran. Ini memberikan peluang bagi negara kecil seperti Turki yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh untuk mempertahankan posisi mereka sebagai lawan bicara di kedua sisi, seperti yang ditunjukkan oleh kesepakatan biji-bijian. Turki telah mencoba untuk mempertahankan keseimbangan yang baik, dengan hati-hati memilih otonomi strategis dan netralitas aktif dengan menolak untuk bergabung dengan sebagian besar sanksi Barat, serta menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan semua pihak dan bertindak sebagai mediator.

Turki mempertahankan hubungannya dengan Rusia serta Ukraina tanpa membahayakan kepentingan geostrategisnya dalam Perang Rusia-Ukraina. Sementara, pada saat yang sama menghindari bergabung dengan NATO dalam menjatuhkan sanksi kepada Rusia (Brian M. Jenkins, 2023). Peran untuk menjadi mediator yang ingin diambil oleh Presiden Erdoğan, memungkinkan Turki untuk memposisikan dirinya di tengah konflik tersebut (Brian M. Jenkins, 2023). Polarisasi politik yang dipicu oleh perang di Ukraina telah mengancam banyak negara yang telah bekerja selama bertahun-tahun dengan pihak yang berkonflik untuk membangun kebijakan luar negeri yang seimbang.

Negara-negara Barat di bawah bimbingan AS mendesak mereka untuk melakukan sanksi bersama melawan Rusia, yang seringkali berarti mengabaikan tindakan dari negara-negara lainnya untuk melakukan penyeimbangan hubungan di antara kekuatan-kekuatan besar (Brian M. Jenkins, 2023). Dalam lingkungan internasional yang anarkis, sikap netralitas di pihak negara-negara yang berjuang untuk tidak memihak tidak diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik, yang mana berusaha untuk memobilisasi dukungan untuk upaya mereka sendiri (Brian M. Jenkins, 2023). Turki khususnya harus mengukir jalan yang tidak mengancam hubungan dengan Rusia atau Barat yang mendukung Ukraina.

Perang di Ukraina telah memberi Turki peluang dan juga risiko. Setelah sentralisasi kekuasaan politik pada tahun 2015 di tangan Recep Erdoğan, presiden Erdogan memindahkan ambisi dan tujuan pribadinya ke garis depan kebijakan luar negeri Turki (Brian M. Jenkins, 2023). Secara khusus, dia berusaha menjadikan Turki sebagai negara adidaya bagi negara-negara Muslim yang mampu menjadi salah satu kekuatan non-Barat pertama yang dapat membentuk tatanan dunia baru (Brian M. Jenkins, 2023). Untuk mempertahankan arah ini, Turki harus menemukan sebuah cara untuk menghadapinya. Dengan demikian, maka Turki dalam hal ini melakukan strategic hedging terhadap para pihak yang terlibat dalam Perang Rusia-Ukraina, yakni dengan menerapkan strategic hedging terhadap Rusia dan Ukraina.

#### **4.2.1. Strategi Turki Terhadap Rusia**

Turki tidak ingin menurunkan hubungannya dengan Rusia dengan bergabung dalam sanksi ekonomi yang dipimpin Barat, dimana Turki telah menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Bagi Turki, Rusia menjadi mitra dagang yang penting bagi mereka. Dalam hal ini, pemerintah Turki menciptakan peluang agar Turki dapat keluar dari krisis Ukraina. Mengingat ekonomi Turki yang maju dan terdiversifikasi dan kedekatan secara ekonomi dengan Rusia. Keterbukaan Turki terhadap Rusia sejak perang Ukraina telah menghasilkan arus masuk keuangan yang signifikan dari Rusia ke Turki dari berbagai sektor sebagai berikut:

Ketika para pemimpin Rusia dan Turki bertemu di Sochi pada bulan Agustus, mereka sepakat untuk menjaga hubungan ekonomi antara kedua negara serta mengisyaratkan bahwa mereka mencapai kesepakatan perdagangan. Data resmi dari pemerintah Turki menunjukkan bahwa total ekspor dari Turki ke Rusia pada tahun 2022 meningkat menjadi \$8 miliar dari \$5,7 miliar pada tahun 2021 (Ebru Tuncay & Birsen Altayli, 2023). Rusia juga menjadi sumber investasi asing bagi Turki dengan nilai lebih dari \$10 miliar pada tahun 2022 (Nicolas Bourcier, 2022). Rusia pun menjadi pemasok energi bagi Turki dengan menyumbang sekitar 33% gas alam di tahun 2022 (Nicolas Bourcier, 2022). Selain itu, Orang

Rusia menjadi sumber turis yang besar dengan menyumbang hampir 5 juta kunjungan di tahun 2022 (Nicolas Bourcier, 2022).

Turki menolak untuk bergabung dengan sanksi dari negara-negara Barat yang menargetkan perjalanan udara ke dan dari Rusia, kemudian menghubungkan bandara dan warga Rusia ke wilayah udara internasional dan hub global (Paul B. Osterlund, 2022). Dengan demikian, banyak warga Rusia yang mengunjungi Turki daripada negara eropa lain. Data resmi dari pemerintah Turki menunjukkan bahwa, sekitar 5,3 juta orang Rusia mengunjungi Turki pada tahun 2022, secara signifikan pulih dari pandemi yang sebesar 2,1 juta pada tahun 2020 dan mendekati rekor pra-pandemi sebanyak 7 juta pada tahun 2019 (Paul B. Osterlund, 2022).

Orang-orang Rusia dapat memperoleh kewarganegaraan Turki melalui skema investasi kewarganegaraan Turki, yang mana harus berinvestasi minimal sekitar \$400.000 di negara tersebut (Turkstat, 2022). Dimana, banyak yang memilih untuk berinvestasi di sektor real estate setidaknya 12.960 warga Rusia membeli rumah di Turki sejak 6 bulan dari awal perang di Ukraina, menurut data resmi dari TURKSTAT, badan statistik Turki (Turkstat, 2022). Orang Rusia juga menjadi warga negara teratas pada tahun 2022 yang memiliki izin tinggal di Turki, menurut data pemerintah (Turkstat, 2022). Turki juga telah menjadi tujuan utama bagi oligarki Rusia yang telah membeli real estate mewah di negara itu, sekaligus memarkir kapal pesiar mereka di Turki untuk menghindari penyitaan dari pemerintah Eropa yang telah memberi sanksi kepada pejabat dan oligarki Rusia (Turkstat, 2022).

Pada Juli 2022, Rusia mentransfer sekitar \$20 miliar kepada Turki demi pembangunan PLTN Akkuyu yang sedang dibangun di sepanjang pantai selatan Anatolia di wilayah selatan Turki (Daily Sabah, 2022). Sementara uang itu dikirim ke rekening Rosatom, perusahaan Rusia yang membangun pembangkit listrik, uang Rusia mengalir ke seluruh ekonomi Turki, memberikan bantuan sementara bagi warga negara biasa dari hiperinflasi, sambil memungkinkan bank-bank Turki demi melunasi hutang internasional mereka (Daily Sabah, 2022).

Terakhir, Turki melihat peluang untuk mencapai tujuan yang telah lama diupayakan untuk menjadi pusat transit gas utama untuk Eropa (Hamdi Firat Buyuk, 2023). Dengan sekutu Eropa bertekad untuk mengurangi ketergantungan mereka pada impor gas dari Rusia, Turki menawarkan layanannya dan melobi untuk merealisasikan pipa bawah laut baru (yang telah lama dibahas antara Israel dan Turki) dengan Rusia, yang akan memungkinkan gas dari Kawasan Mediterania timur dapat mencapai Eropa melalui Turki (Hamdi Firat Buyuk, 2023). Dengan melihat strategi Turki terhadap Rusia, dapat dilihat bahwa Turki ingin memperbaiki perekonomiannya sehingga dalam hal ini Turki melakukan kerjasama dengan Rusia di berbagai sektor perekonomian yaitu di bidang pariwisata, energi, dan perdagangan.

#### **4.2.2. Strategi Turki Terhadap Ukraina**

Upaya Turki untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan Rusia sambil melakukan kerjasama di bidang militer dengan Ukraina menjadi tindakan penyeimbangan di antara kedua belah pihak yang saling bertikai ini. Turki dan Ukraina memiliki kepentingan sama yang membuat kerja sama di bidang pertahanan sangat bernilai bagi masing-masing negara. Turki secara konsisten menganut sikap pro terhadap Ukraina dalam perang melawan Rusia.

Turki dan Ukraina menandatangani perjanjian untuk memperdalam kemitraan strategis mereka dan meningkatkan kerja sama keamanan. Fondasi kerja sama pertahanan Turki-Ukraina diletakkan pada Maret 2016 selama kunjungan ke Turki oleh Presiden Ukraina saat itu yaitu Poroshenko, dan fondasi ini tetap kuat bahkan setelah meletusnya Perang Rusia-Ukraina (Ilayda Nijhar, 2022). Turki terus memandang Ukraina sebagai pasar untuk produk industri pertahanannya dan sebagai pemasok alternatif komponen penting seperti mesin helikopter, pesawat berawak dan tak berawak, serta rudal (Ilayda Nijhar, 2022).

Posisi Turki dalam konflik tersebut juga mendukung kepentingan Ukraina. Turki menggambarkan operasi militer khusus Rusia sebagai "invasi militer ilegal" dan memilih untuk mengutuk Rusia di Majelis Umum PBB pada 2 Maret 2022 (Ilayda Nijhar, 2022). Dalam hal ini, Ukraina memberikan pujian atas kebijakan

Turki tersebut. Ini bukan pertama kalinya Turki secara terbuka mengecam tindakan Rusia di wilayah tersebut, Turki pun mengkritik pencaplokan Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan secara blak-blakan mendukung klaim Ukraina atas Krimea dan Tatar Krimea, sebuah kelompok etnis Turki yang telah dianiaya di bawah kontrol Rusia. Turki juga bergabung dengan inisiatif yang dilakukan oleh diplomatik Ukraina seperti KTT Platform Krimea Agustus 2021.

Selain itu pada akhir Februari 2022, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky secara emosional berterima kasih kepada Turki karena mendukung Ukraina dalam menutup selat Laut Hitam untuk kapal-kapal Rusia sesuai dengan Konvensi Montreux (Ilayda Nijhar, 2022). Meskipun, pihak Ukraina tidak mengetahui bahwa pada awal Februari Rusia telah bergerak secara signifikan angkatan laut ke Laut Hitam melalui selat ini (Ilayda Nijhar, 2022). Menteri pertahanan Ukraina berterima kasih kepada Turki atas pengiriman batch baru UAV Bayraktar TB2 selain yang telah diterima Ukraina pada tahun 2021 (Ilayda Nijhar, 2022). Dengan melihat strategi Turki terhadap Ukraina, dapat dilihat bahwa Turki menjalin kerjasama dengan Ukraina di bidang militer dengan mengirimkan berbagai persenjataan dan mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia melalui jalur diplomatik. Pengiriman persenjataan kepada Ukraina dan dukungan secara diplomatik tersebut dilakukan untuk memperbaiki citra Turki di mata para anggota NATO lainnya.

## BAB 5

### KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya Turki mengambil kebijakan luar negeri secara “mendua” (strategic hedging) terhadap Rusia dan Ukraina. Turki menjalin kerjasama ekonomi dengan Rusia dan Turki menjalin kerjasama militer dengan Ukraina. Rusia merupakan mitra dagang yang penting bagi ekonomi Turki dengan menyediakan 33% gas alam dan 70% gandumnya kepada mereka. Rusia pun merupakan sumber turis terbesar di Turki, dengan 4,7 juta pengunjung ke negara tersebut pada tahun 2021. Disisi lain, Turki membangun kerjasama pertahanan dengan Ukraina. Dimana, Turki bersedia membantu Ukraina dalam memberikan persenjataan militer kepada mereka. Ukraina menandatangani kesepakatan dengan Turki untuk mengirimkan drone tempur, mobil militer, dan amunisi.

Dengan kebijakan luar negeri semacam itu, Turki di satu sisi ingin memperbaiki perekonomiannya dengan melakukan berbagai kerjasama dengan Rusia seperti: mengintensifkan perdagangan di antara kedua negara melalui lembaga Dewan Kerjasama Tingkat Tinggi (HLCC), membuka pintu secara lebar-lebar bagi wisatawan dari Rusia, mengencarkan investasi dengan iming-iming pemberian kewarganegaraan, dan pembangunan PLTN demi menjaga harga energi di negaranya. Sedangkan di sisi lain, Turki menjalin kerjasama dengan Ukraina dalam bidang pertahanan melalui High-Level Cooperation Council yang diimplementasikan ke dalam kerjasama pertahanan dengan Ukraina pada tahun 2016 dan memberikan dukungan secara diplomatik terhadap Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pengiriman persenjataan kepada Ukraina dan dukungan secara diplomatik tersebut dilakukan untuk memperbaiki citra Turki di mata para anggota NATO lainnya. Sehingga, Turki dapat memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak terutama dari negara-negara Barat ketika menjalin suatu kerjasama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. (2011). *Metodologi penelitian praktis*. Yogyakarta: Teras, 201(1).
- Kementerian Agama RI. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bourcier, Nicolas. (2022). *Turkey has turned into a trade platform between Russia and the West*.  
[https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/10/24/turkey-has-turned-into-a-trade-platform-between-russia-and-the-west\\_6001620\\_4.html](https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/10/24/turkey-has-turned-into-a-trade-platform-between-russia-and-the-west_6001620_4.html).  
 (Diakses pada 15 Mei 2023).
- Breuning, M. (2007). *Foreign policy analysis: A comparative introduction*. Springer.
- Buyuk, F. Hamdi. (2023). *Turkey's Foreign Trade Deficit Spikes, Imports from Russia Double*. <https://balkaninsight.com/2023/01/31/turkeys-foreign-trade-deficit-spikes-imports-from-russia-double/>. (Diakses pada 15 Mei 2023).
- Chausovsky, Eugene. (2022). *Turkey Is the Biggest Swing Player in the Russia-Ukraine War*. <https://foreignpolicy.com/2022/08/11/turkey-russia-ukraine-war-swing-player/>. (Diakses pada 11 Februari 2023)
- Dries Lesage, Emin Daskin, and Hasan Yar. (2022). *The War in Ukraine and Turkey's Hedging Strategy Between the West and Russia*.  
[https://www.ugent.be/ps/politiekwetenschappen/gies/en/research/publications/gies\\_papers/2022-ukraine/the-war-in-ukraine-and-turkeys-hedging-strategy-between-the-west-and-russia](https://www.ugent.be/ps/politiekwetenschappen/gies/en/research/publications/gies_papers/2022-ukraine/the-war-in-ukraine-and-turkeys-hedging-strategy-between-the-west-and-russia). (Diakses pada 13 Februari 2023)
- Dugis, V. (2008). *Explaining foreign policy change*. Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, 2(20).
- Fisher, Alan. (2022). *Russia, Ukraine sign UN-backed grain export deal*.  
<https://www.aljazeera.com/news/2022/7/22/the-grain-export-deal-what-to-know>. (Diakses pada 15 April 2023).

- Gumrukcu, Tuvan & Erkoyun, Ezgi. (2022). *Turkey's Erdogan calls for immediate Ukraine-Russia ceasefire, supports NATO enlargement*. <https://www.reuters.com/world/turkeys-erdogan-calls-immediate-ukraine-russia-ceasefire-supports-nato-2022-03-01/>. (Diakses pada 23 Maret 2023).
- İşçi, O. (2019). *Turkey and the Soviet Union During World War II: Diplomacy, Discord and International Relations*. IB Tauris.
- Jenkins, M. Brian. (2023). *Consequences of the War in Ukraine: Two Areas of Contention—Turkey and the Balkans*. <https://www.rand.org/blog/2023/03/consequences-of-the-war-in-ukraine-turkey-and-the-balkans.html>. (Diakses pada 13 Mei 2023).
- Massad, Joseph. (2022). *Crimean Tatars caught between Russia and Ukraine*. <https://www.middleeasteye.net/opinion/crimean-tatars-historic-tragedy-current-leadership-replicated>. (Diakses pada 10 Mei 2023).
- Nijhar, Hayda. (2022). *Ankara's political test: what is really shaping Turkey's response to the Russia-Ukraine war?*. <https://odi.org/en/insights/ankaras-political-test-what-is-really-shaping-turkeys-response-to-the-russia-ukraine-war/>. (Diakses pada 16 Mei 2023).
- Osterlund, B. Paul. (2022). *'Now in shambles': Turkey's tourism revival fades on Russian war*. <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/2/lack-of-russian-visitors-to-turkey-contributes-to-tourism-slump>. (Diakses pada 23 April 2023).
- Ozberk, Tayfun. (2022). *Turkey closes the Dardanelles and Bosphorus to warships*. <https://www.navalnews.com/naval-news/2022/02/turkey-closes-the-dardanelles-and-bosphorus-to-warships/>. (Diakses pada 14 Maret 2023).
- Daily Sabah. (2022). *Russia transfers billions of dollars to Turkey for \$20B nuclear plant*. <https://www.dailysabah.com/business/energy/russia-transfers-billions-of-dollars-to-turkey-for-20b-nuclear-plant>. (Diakses pada 03 Mei 2023).
- Salman, M & Geeraerts, G. (2014). *Measuring Strategic Hedging*. The American Political Science Association Annual Meeting.

- Stein, Aaron. (2015). *Turkey's new foreign policy: Davutoglu, the AKP and the pursuit of regional order*. Routledge.
- Steven, A. Cook. (2022). *Where Turkey Stands on the Russia-Ukraine War*. <https://www.cfr.org/in-brief/where-turkey-stands-russia-ukraine-war>. (Diakses pada 17 Mei 2023).
- Tessman, B., & Wolfe, W. (2011). *Great powers and strategic hedging: The case of Chinese energy security strategy*. *International Studies Review*, 13(2).
- Tuncay, Ebru & Altayli, Birsen. (2023). *CEO of Turkey's top bank says capital boost to help it drive economy in 2023*. <https://www.reuters.com/business/finance/ceo-turkeys-top-bank-says-capital-boost-help-it-drive-economy-2023-2023-01-09/>. (Diakses pada 19 April 2023).
- Turhan, Sebnem. (2022). *How Ukraine crisis undermines Turkey's economic program*. <https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/how-ukraine-crisis-undermines-ankaras-economic-program>. (Diakses pada 28 April 2023).
- Turkstat. (2022). *House Sales Statistics, December 2022*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=House-Sales-Statistics-December-2022-49526&dil=2>. (Diakses pada 01 Mei 2023).
- Weiss, Michael & Rushton, James. (2023). *Turkey supports Ukraine without alienating Russia*. <https://news.yahoo.com/turkey-supports-ukraine-without-alienating-russia-100046689.html>. (Diakses pada 05 Mei 2023).
- Yusup, F. (2018). *Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif*. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1).